



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM.
BUPATI GROBOGAN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016 KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Substansi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada masyarakat, meliputi :

- A. Urusan Desentralisasi;
- B. Tugas Pembantuan; dan
- C. Tugas Umum Pemerintahan.

Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun

Anggaran 2016, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 6 bulan setelah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan secara geografis berada di bagian timur dan berada di jalur tengah Provinsi Jawa Tengah, terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang.

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², Kabupaten Grobogan memiliki wilayah terluas ke-2 se-Provinsi Jawa Tengah, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Purwodadi. Secara administrasi Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.444.202 jiwa, mengalami pertumbuhan penduduk 0,89% atau bertambah 12.667 jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2015.

Kepadatan Penduduk tercatat sebesar 731 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.773 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Geyer yaitu sebesar 338 jiwa/km².

Dilihat dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 727.127 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 717.075 jiwa, maka sex rasio penduduk mencapai 101%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan usia, rasio ketergantungan penduduk sebesar 41%, artinya setiap 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung 41 jiwa penduduk yang non produktif, angka ketergantungan sebesar 41% ini masuk dalam kategori ketergantungan rendah.

Jumlah penduduk miskin selama lima tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 17,36% pada tahun 2011 dan berurutan mengalami penurunan, yaitu 16,13% pada tahun 2012, 14,87% pada tahun 2013, 13,86% pada tahun 2014, dan pada akhir tahun 2015 sebesar 13,68%.

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan penduduk, tamatan SD atau sederajat terhitung sebanyak 43%, tidak atau belum tamat SD sebanyak 28%, tamat SLTP atau sederajat 17%, tamat SLTA atau sederajat 10%, dan tamat Diploma, S1, S2 dan S3 sebanyak 2%.

Selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir masuk kategori SEDANG, dan selalu mengalami kenaikan, mulai dari 65,41 pada tahun 2011 menjadi 68,05 pada tahun 2015.

3. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 selalu mengalami pertumbuhan positif, terakhir pada tahun 2015 mencapai 5,96%. PDRB Perkapita juga kondisinya terus mengalami

kenaikan. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2015 terhitung sebesar Rp.14.933.888,- atau naik sebesar 10,39% dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya aspek pemerataan pendapatan, dapat dilihat melalui indikator Gini Rasio dan Proporsi Pendapatan yang Dinikmati Oleh Kelompok 40% Penduduk yang Berpendapatan Terendah sesuai Kriteria Bank Dunia. Berdasarkan indikator Gini Rasio, sampai dengan tahun 2015 masuk kategori pemerataan tinggi, karena angka Indeks Gini masih di bawah batas ketimpangan, yaitu 0,35.

Demikian juga indikator Proporsi Pendapatan, sampai dengan tahun 2015 selalu berada dalam kategori pemerataan tinggi, karena persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah masih di atas batas ketimpangan, yaitu 17%.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun, yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera"**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan konkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

B. PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016, prioritas pembangunan tahun 2016 diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
2. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Peningkatan pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial.
7. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua.
8. Peningkatan kesadaran hukum.
9. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik.
10. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

III. KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016.

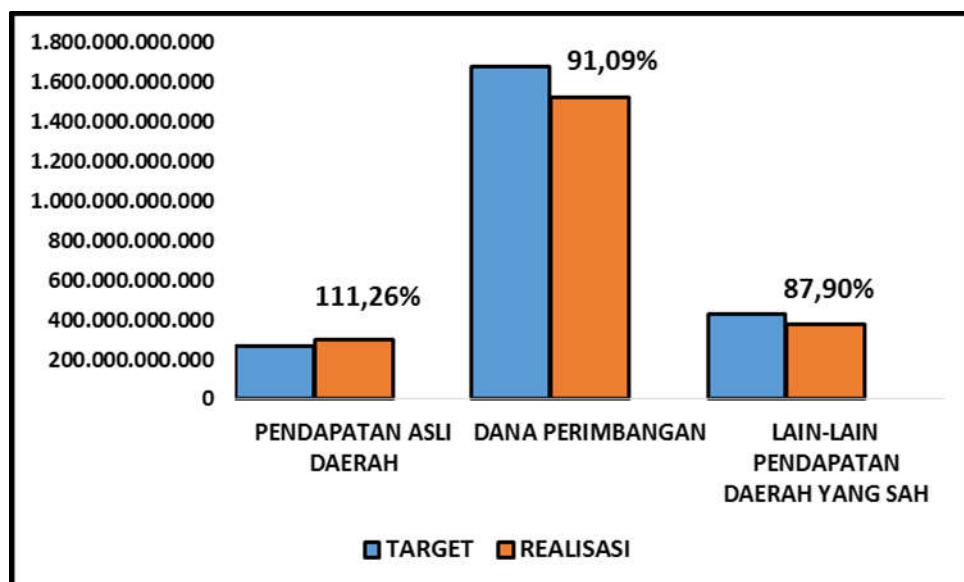
Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka

realisasi APBD yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

A. PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2016 sebesar Rp.2.374.362.555.000,- terealisasi Rp.2.203.275.381.321,- atau 92,79%, dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.268.933.420.000,- terealisasi Rp.299.211.316.168,- atau 111,26%, target Dana Perimbangan sebesar Rp.1.674.832.773.000,- terealisasi Rp.1.525.575.352.799,- atau 91,09%, dan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.430.596.362.000,- terealisasi Rp.378.488.712.354,- atau 87,90%.

Target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Adapun secara rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016, adalah sebagaimana tabel berikut:

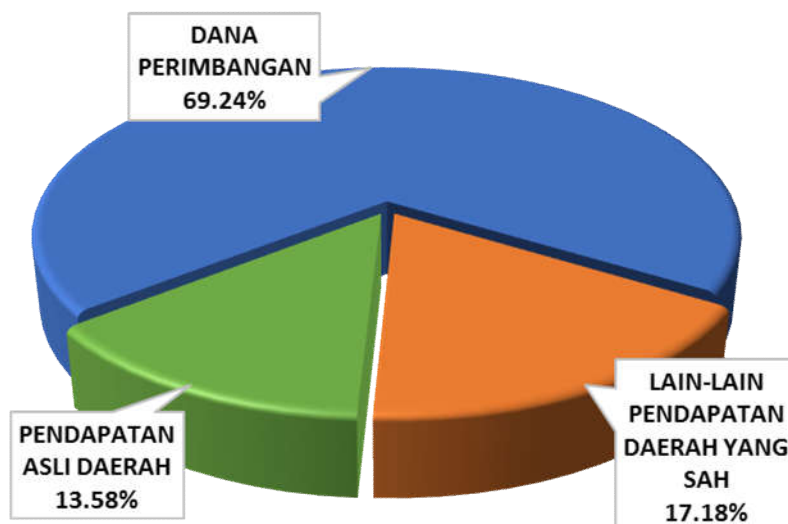
Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN	2.374.362.555.000	2.203.275.381.321	92,79

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	268.933.420.000	299.211.316.168	111,26
1	Pendapatan Pajak Daerah	52.105.000.000	58.622.010.690	112,51
2	Pendapatan Retribusi Daerah	29.569.775.000	29.772.753.265	100,69
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.895.859.000	11.908.003.992	100,10
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175.362.786.000	198.908.548.221	113,43
B	DANA PERIMBANGAN	1.674.832.773.000	1.525.575.352.799	91,09
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	52.394.527.000	56.510.215.649	107,86
2	Dana Alokasi Umum	1.110.337.027.000	1.110.337.027.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	476.361.117.000	322.988.008.150	67,80
5	Dana Insentif Daerah	35.740.102.000	35.740.102.000	100,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	430.596.362.000	378.488.712.354	87,90
1	Pendapatan Hibah	7.203.355.000	6.434.927.618	89,33
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	177.840.552.000	128.330.329.736	72,16
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.971.455.000	179.971.455.000	100,00
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65.581.000.000	63.752.000.000	97,21

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

Kontribusi terbesar dari Pendapatan Daerah masih dari Dana Perimbangan sebesar 69,24%, selanjutnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 17,18% dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,58%. Komposisi sumber pendapatan ini khususnya Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 0,19% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 mempunyai kontribusi sebesar 13,46%. Untuk itu di tahun-tahun yang akan datang diupayakan supaya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dapat kembali meningkat. Komposisi penyumbang pendapatan Daerah ini, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

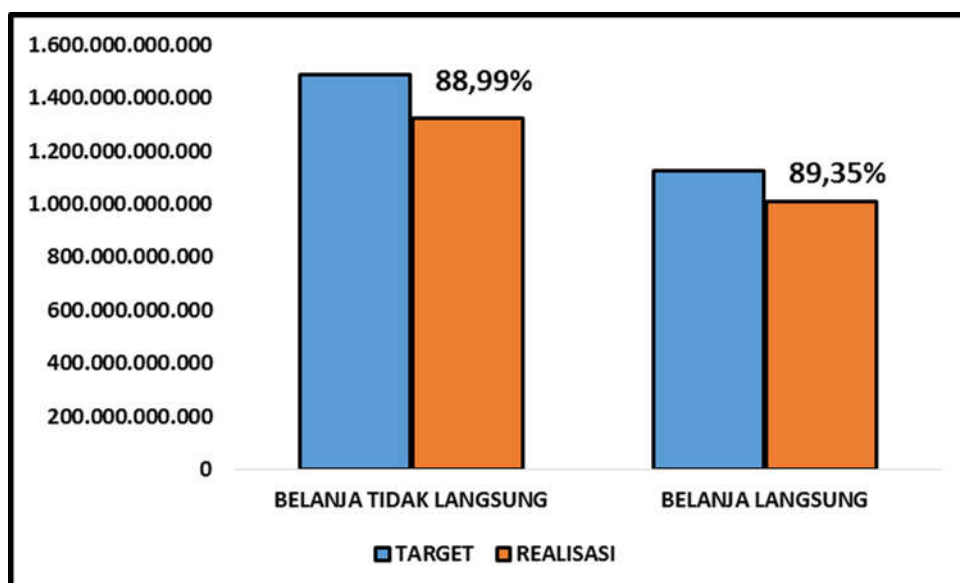


Gambar 2
Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah Tahun 2016

B. BELANJA DAERAH

Target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2016 sebesar Rp.2.615.270.722.441,- terealisasi Rp.2.331.312.039.305,- atau 89,14%, dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.488.003.187.441,- terealisasi Rp.1.324.106.933.697,- atau 88,99% dan target Belanja Langsung sebesar Rp.1.127.267.535.000,- terealisasi Rp.1.077.205.105.608,- atau 89,35%.

Serapan Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 3
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2016

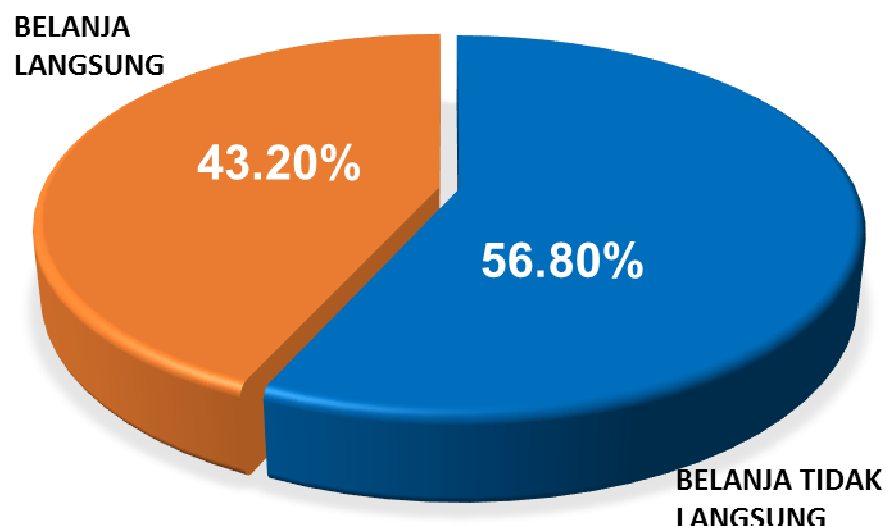
Adapun secara rinci target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	2.615.270.722.441	2.331.312.039.305	89,14
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.488.003.187.441	1.324.106.933.697	88,99
1	Belanja Pegawai	1.076.500.985.241	922.053.890.283	85,65
2	Belanja Bunga	47.179.000	2.789.448	5,91
3	Belanja Subsidi	506.500.000	488.500.000	96,45
4	Belanja Hibah	27.214.750.000	23.324.416.714	85,71
5	Belanja Bantuan Sosial	16.571.258.200	13.483.734.000	81,37
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	353.807.765.500	352.677.764.750	99,68
7	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10.854.749.500	10.854.749.500	100
8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	1.221.089.002	48,84
B	BELANJA LANGSUNG	1.127.267.535.000	1.007.205.105.608	89,35
1	Belanja Pegawai	589.806.341.58	54.444.650.350	92,31
2	Belanja Barang dan Jasa	502.540.227.210,40	457.899.371.938	91,12
3	Belanja Modal	565.746.673.631.60	494.861.083.320	87,47

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

Sedangkan Komposisi serapan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 56,80% dan belanja langsung 43,20%, dapat disajikan dalam Gambar sebagai berikut :



Gambar 4
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2016

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp.258.536.570.691,- atau 99,54% dari target penerimaan sebesar Rp.259.721.663.441,-. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp.10.672.447.800,- atau 56,73% dari target pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.18.813.496.000,-.

Selanjutnya perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2016, terdapat Defisit sebesar Rp.128.036.657.984,- sedangkan pembiayaan netto sebesar Rp.247.864.122.891,- dengan demikian maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 119.827.464.907,-.

Realisasi pembiayaan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2016

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1	Pendapatan	2.374.362.555.000	2.203.275.381.321	92,79
2	Belanja	2.615.270.722.441	2.331.312.039.305	89,14
	Surplus/Defisit	(240.908.167.441)	(128.036.657.984)	53,15
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	259.721.663.441	258.536.570.691	99,54
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	18.813.496.000	10.672.447.800	56,73
	Pembiayaan Netto	240.908.167.441	247.864.122.891	102,89

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	119.827.464.907	
--	--	---	-----------------	--

Sumber : BPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, dengan anggaran sebesar Rp.1.127.267.535.000,- dan terealisasi 89,35%.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2016, dipaparkan secara singkat sebagai berikut :

A. Penguatan Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal

Pada tahun 2016, telah diupayakan peningkatan jalan kabupaten sesuai kondisi keuangan daerah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jalan dengan kondisi baik/mantap meningkat 65,42 km, jalan dengan kondisi sedang meningkat 6,37 km. Sebaliknya, jalan dengan kondisi rusak ringan berkurang 26,08 km dan jalan dengan kondisi rusak berat berkurang 45,71 km.

Pencapaian prioritas pembangunan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perhubungan dan Urusan Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp.303.530.700.652,- terealisasi sebesar 92,77%.

B. Peningkatan Ketrampilan dan Kewirausahaan

Usaha meningkatkan ketrampilan dan kewirausahaan diselenggarakan melalui Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Pariwisata, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan anggaran sebesar Rp.11.402.720.000,-, terealisasi sebesar 95,60%.

Penyelenggaraan Urusan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan, diantaranya pembinaan dan pelatihan terhadap Industri Kecil dan Menengah, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta pameran dalam rangka promosi produk IKM dan UMKM, baik pada tingkat lokal, provinsi maupun nasional.

C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian prioritas ini ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Otonomi Daerah, Urusan Pertanahan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Kearsipan, serta Urusan Perpustakaan, dengan anggaran sebesar Rp.122.426.680.875,- terealisasi sebesar 90,99%.

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut juga mendapat dukungan dari Pemerintah dalam bentuk Tugas Pembantuan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran sebesar Rp.2.336.422.000,- terserap sebesar 93,79%.

D. Peningkatan Pemerataan Pembangunan

Upaya meningkatkan pemerataan pembangunan ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Otonomi Daerah, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Statistik, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral serta Urusan Penataan Ruang, dengan anggaran sebesar Rp.118.129.820.155,- terealisasi sebesar 93,59%.

Adapun program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

E. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diselenggarakan melalui Urusan Kesehatan, dengan anggaran Rp.364.260.090.517,- terealisasi sebesar 84,64%.

Program-program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Perbaikan Gizi Masyarakat serta Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, adalah Rehabilitasi 18 Puskesmas dan 3 Puskesmas Pembantu.

F. Peningkatan Kerukunan Antar Umat Beragama dan Kesetiakawanan Sosial

Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban antar umat beragama dibutuhkan toleransi yang baik. Toleransi tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap saling pengertian dan menghargai, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan rukun dan penuh kedamaian tanpa diskriminasi.

Pencapaian prioritas ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan serta Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dengan anggaran sebesar Rp.4.435.503.000,- terealisasi sebesar 97,10%.

G. Peningkatan Program Pro Rakyat (Penanggulangan Kemiskinan) dan Program Keadilan Untuk Semua

Pencapaian prioritas ini didukung melalui penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Perumahan, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Transmigrasi, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Urusan Perdagangan serta Urusan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.132.006.824.611,- terealisasi sebesar 84,95%.

Di samping itu, untuk mendukung prioritas program pro rakyat, juga ditunjang dengan belanja tak langsung, antara lain berupa Bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, Bantuan tunjangan fungsional Guru Pra Dikdas Non PNS, Bantuan keuangan kepada desa, Bantuan pemugaran perumahan penduduk miskin, serta subsidi kepada masyarakat untuk pasar murah, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.365.876.446.000,-.

H. Peningkatan Kesadaran Hukum

Pencapaian prioritas peningkatan kesadaran hukum, ditempuh melalui penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, yang tertampung dalam program dan kegiatan, baik yang bersifat umum maupun spesifik dengan total anggaran Rp.7.907.113.500,- dan terealisasi 85,15%.

Adapun program yang dilaksanakan, diantaranya adalah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, serta Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, yang dilakukan melalui kegiatan

diantaranya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum).

I. Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi dan Berpolitik

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan berpolitik, setiap tahun dilaksanakan Program Pendidikan Politik Masyarakat. Pada tahun 2016, pelaksanaan program ini difokuskan pada beberapa kegiatan, diantaranya Kegiatan Orientasi Wawasan Kebangsaan, Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik, serta Sarasehan Generasi Muda dalam rangka membangun budaya politik berwawasan kebangsaan.

Upaya meningkatkan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik dilaksanakan melalui penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan anggaran sebesar Rp.1.320.250.000,- terealisasi sebesar 86,43%.

J. Perintisan dan Pengembangan Industri dan Perdagangan yang Terkait Dengan Pertanian Dalam Arti Luas

Upaya untuk mencapai prioritas pembangunan ini dapat dilihat dari capaian kinerja diantaranya pada bidang perikanan, dimana produksi perikanan mencapai 3.019 ton, 2% lebih tinggi dari yang ditargetkan daerah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan sebesar 14,51 kilogram per kapita per tahun, 5% lebih tinggi dari yang ditargetkan daerah.

Di bidang pertanian, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 6,44 ton per hektar, meningkat 0,15 ton per hektar dibanding tahun sebelumnya.

Di bidang perdagangan, nilai ekspor bersih pada tahun 2016 sebesar Rp.211.899.989.000,- meningkat 49,19% dibanding tahun sebelumnya.

Di bidang industri, jumlah keseluruhan industri pada tahun 2016 sebanyak 18.386, meningkat 0,93% dibanding tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan untuk mencapai prioritas ini adalah Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, Ketahanan Pangan, Penanaman Modal, Perdagangan serta Perindustrian, dengan total anggaran sebesar Rp.61.847.831.690,- terealisasi sebesar 97,17%.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui 2 (dua) Kementerian, yaitu: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan total anggaran sebesar Rp.27.149.018.000,- dan terserap sebesar Rp.23.921.845.588,- atau 88,11%, dengan perincian sebagai berikut :

- A. Tugas Pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri, dengan anggaran Rp.2.336.422.000,- terealisasi 93,79%, digunakan untuk Program Penataan Administrasi Kependudukan serta Program Bina Pembangunan Daerah.
- B. Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp.24.812.596.000,- terealisasi 87,58%, digunakan untuk Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, serta Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2016, antara lain sebagai berikut :

- A. Kerja sama antar daerah, berupa kerja sama regional Kedungsepur yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Demak, Grobogan, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, kerja sama penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya mengenai Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan.
- B. Kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Purwodadi, *Center For Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI), Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Poltekes Kemenkes Semarang, STIKES Cendekia Utama Kudus dan lain-lain.

- C. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Instansi Vertikal, dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan, kesamaan langkah dan keharmonisan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kegiatan ini ditempuh melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- D. Terkait dengan pembinaan batas wilayah, pada tahun 2016 dilaksanakan Kegiatan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak dan Antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora, dengan realisasi terpasangnya patok pilar perapatan batas daerah antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Demak sebanyak 5 unit dan pembangunan kembali pilar patok batas antara Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Blora sebanyak 1 unit.
- E. Dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pemetaan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat, bantuan air bersih, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, rehabilitasi hutan dan lain-lain.
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan unsur masyarakat.
- G. Hal Lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015.
2. Penghargaan Nasional sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia.
3. Penghargaan Nasional tingkat madya "Anugerah Parahita Ekapraya" bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Peringkat II Nasional Lomba Web Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Pertanian.
5. Peringkat II Nasional sebagai Paramedik Puskesmas Berprestasi a.n. Tidar Arga Sasmita, S.Pt.

6. Peringkat II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Padi a.n. Kelompok Tani "Makmur" Desa Sumberagung Kecamatan Godong.
 7. Peringkat II Nasional Lomba Kelompok Tani Komoditas Kedelai a.n. Kelompok Tani "Sidodadi" Desa Tuko Kecamatan Pulokulon.
 8. Peringkat III Nasional lomba Petugas Inseminator Berprestasi a.n. Edy Sugijanto;
- serta masih banyak penghargaan lainnya dari tingkat provinsi.

VII. PENUTUP

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Grobogan yang meliputi aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan sehingga dapat berjalan secara baik dan kondusif.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan untuk tahun berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala meridloi usaha kita semua. Amin.



Purwodadi, 27 Maret 2017

BUPATI GROBOGAN

Hj. SRI SUMARNI, SH, MM